

POLITIK IDENTITAS: RADIKALISME, TERORISME DAN DISKRIMINASI RASIAL

Raja Faiz el Shidqi^{1,*}, Lusi Andriyani²

¹Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan K.H. Ahmad Dahlan Cirende, Ciputat – Tangerang Selatan, 15419

*rajafaidz@gmail.com

ABSTRAK

Politik Identitas sebagai sebuah upaya memperjuangkan kepentingan bersama akan berjalan maksimal jika diterapkan pada kontestasi politik internasional, sebagai suatu hal yang sensitif politik identitas hanya akan memicu penggunaan isu radikalisme, terorisme dan tindakan diskriminasi ras serta etnis akibat adanya perbedaan pandangan, pilihan dan kepentingan. Pembahasan bertujuan untuk mencari letak sumber masalah dengan menggunakan metode kualitatif dan memberikan pandangan bahwa tidak semestinya menggunakan dan melempar isu radikalisme dan terorisme kepada kelompok tertentu jika itu hanya sebuah upaya menjatuhkan antar anak bangsa.

Kata kunci: Radikalisme, Terorisme, Diskriminasi Rasial, Identitas.

ABSTRACT

Identity politics as an effort to fight for common interests will run optimally if applied to international political contestation, as a sensitive matter, identity politics will only trigger the use of radicalism, terrorism and racial and ethnic discrimination due to differences in views, choices and interests. The discussion aims to locate the source of the problem using qualitative methods and provide the view that it is inappropriate to use and throw the issue of radicalism and terrorism to certain groups if it is only an attempt to bring down the nation's children.

Keyword: *Radicalism, Terrorism, Discrimination racial, Identity*

1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah bangsa yang besar dan terdiri dari berbagai pulau-pulau, Indonesia tentu memiliki keanekaragaman budaya, suku, ras, bahasa maupun agama yang berbeda-beda. Selain itu, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi juga berarti memungkinkan adanya pergantian kekuasaan setiap periode tertentu dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar atau filosofi hidup berbangsa terkhusus pada sila ke – 3 yaitu Persatuan Indonesia, menjadikannya sebuah impian dan harapan bahwa bangsa Indonesia sudah seharusnya dan sepatutnya saling

bergandengan tangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun, hal yang perlu disayangkan disini adalah besarnya dampak negatif yang dihasilkan dari suatu sistem politik identitas ditambah perbedaan-perbedaan pendapat, pilihan dan keyakinan yang menyebabkan adanya polarisasi masyarakat secara besar-besaran.

Politik Identitas menjadi suatu persoalan yang menarik untuk dibahas karena dalam aspek tertentu politik identitas dapat menjadi nilai positif yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan suatu kelompok atau bangsa dengan cara dan usaha bersama-sama. Namun, disamping nilai positif, politik identitas

juga menyimpan nilai negatif karena dianggap sebagai sebuah ancaman terpecah belahnya suatu kelompok atau bangsa hal ini biasa disebut disintegrasi bangsa, di Indonesia sendiri sebagai

macam suku, budaya, ras dan agama yang berbeda-beda seringkali politik identitas justru menjadi pemicu tindakan-tindakan intoleransi atau tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.

Dalam sebuah jurnal berjudul "*Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi.*" yang menjadi salah satu arsip di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa politik identitas secara sederhana sebetulnya bisa dimaknai sebagai sebuah strategi politik yang terfokus pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Jadi memang sebuah politik identitas akan sangat baik dan bermanfaat jika diterapkan dalam tataran level atau tingkatan yang benar-benar sesuai atau yang lebih bersifat universal, politik identitas akan menguntungkan jika Indonesia menggunakan strategi yang matang untuk memperjuangkan kepentingan negara ini dikalahkan persaingan internasional.

Semenjak pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2014 yang terdapat dua paslon yaitu Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan Bapak Prabowo dan Hatta Rajasa tercipta adanya sebuah polarisasi yang mengarah kepada disintegrasi bangsa sampai pada pelemparan isu-isu yang tidak mengenakan dari masing-masing pendukung pasangan calon saat itu. Konflik antar anak bangsa ini mulai membesar ketika Sdr. Basuki Tjahja Purnama atau yang biasa dipanggil dengan Ahok terseret kasus Penistaan Agama karena memberikan narasi yang tidak baik terhadap ayat suci Al – Qur'an yang membahas tentang Amanah agama terhadap Umat agar tidak memilih Pemimpin diluar keyakinan mereka (Non-Muslim).

Lalu, ditambah dengan berbagai serangkaian aksi massa dimulai dari aksi 411, 212, 212 Jilid 2, dan seterusnya membuat polarisasi semakin meluas dan memanas. Pada pemilu tahun 2019 yang kembali ditampilkan pertarungan antara Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo isu yang saling dilemparkanpun menjadi tidak terkontrol seperti tuduhan-tuduhan kepentingan komunisme dibalik salah satu paslon, lahir dari

keluarga komunis, penculik dan pembunuh mahasiswa aksi demonstran 1998. Namun, yang sangat disayangkan adalah tidak adanya upaya untuk membuktikan secara transparan isu-isu tersebut hoax atau fakta, karena pada akhirnya isu-isu tetap ada dan seolah dipelihara jika pun pihak berwenang mengambil peran dalam hal tersebut biasanya hanya berakhir penjara kepada penyebar isu. Konferensi atas tuduhan tersebut hoax pun terkesan dibuat-buat dan tidak ilmiah tanpa adanya penelitian dan pengkajian yang mendalam salah satu negara yang memiliki berbagai

Politik identitas sebagai salah satu faktor pemicu disintegrasi bangsa dirasa menjadi sebab akibat diterapkannya politik identitas di ranah yang lebih spesifik seperti di politik dalam negeri khususnya di beberapa daerah yang memang banyak sekali suku, budaya, ras dan agama yang berbeda-beda. Hal ini juga menyebabkan muncul banyaknya stigma-stigma negatif yang digunakan kelompok-kelompok tertentu untuk menyerang dan memojokkan kelompok lainnya antara mayoritas dan minoritas ataupun sebaliknya, contoh stigma negatif yang sering kali muncul adalah radikalisme, terorisme hingga tindakan diskriminasi rasial sehingga pembahasan ini selain menarik juga menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas dan dicari bersama-sama jalan keluarnya agar perpecahan antara anak bangsa dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, adanya sebutan atau panggilan-panggilan yang bernada buruk terhadap kelompok satu dengan kelompok yang lainnya pasca Pemilu 2019 bahkan hingga saat ini menandakan bahwa memang dampak negatif dari politik identitas tersebut nyata.

Selain itu, adanya tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada kelompok tertentu seperti radikalisme ataupun terorisme menjadi suatu hal yang justru semakin memperkeruh suasana, maka dari itu pembahasan tersebut coba dikaji dalam artikel ini. Menurut Manuel Castells, tidak ada satu orangpun tanpa identitas yang digunakan sebagai pembeda dengan orang lain dan politik identitas adalah suatu upaya politik yang mendasarkan cara berpikir maupun kesamaan identitas suatu kelompok dengan tujuan memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut.

Adapun bentuk rencana pemecahan masalah disini adalah dengan menganalisis segala sumber yang berkaitan dengan meluasnya politik identitas ditengah masyarakat yang juga menjadi faktor timbulnya tuduhan-tuduhan irrasional terhadap kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan menghasilkan sebuah solusi atau jalan keluar yang bisa diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif akibat politik identitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian atau pembahasan ini adalah kualitatif dengan mengambil berbagai referensi data dan berita dari buku, jurnal ataupun laman berita-berita terpercaya lalu merangkumnya menjadi satu dengan menganalisis pola-pola yang tercipta serta membahasnya berdasarkan dengan data dan fakta yang fokus kepada masalah politik identitas yang menjadi sebab akibat munculnya stigma-stigma atau tuduhan radikal, teroris dan diskriminasi ras terhadap kelompok masyarakat tertentu lalu mengambil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini berlandaskan pada teori Manuel Castells di dalam bukunya yang berjudul *The Power of Identity* (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 1997), mempertegas bahwa tidak ada satu orangpun tanpa identitas yang digunakan sebagai pembeda dengan orang lain dan Politik Identitas menjadi suatu upaya penting untuk memperjuangkan kepentingan kelompok dalam konteks yang lebih besar ialah suatu bangsa atau negara dalam kancah perpolitikan internasional. Namun, di sisi lain politik identitas juga menyimpan dampak negatif jika diterapkan dalam lingkungan yang lebih kecil atau spesifik seperti politik dalam negeri dan politik di daerah-daerah karena menjadi faktor munculnya berbagai penggunaan isu-isu tak berdasar.

Radikalisme sendiri sebetulnya diambil dari kata dasar radikal dalam bahasa Latinnya ialah radix yang berarti akar. Roger Scruton seorang penulis dari Inggris berpendapat bahwa radikal dikaitkan dengan orang yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya dan dipertegas

dengan doktrin yang dihasilkan oleh sebuah usaha (Scruton, 2007:576-577). Menurut Imran Tahir keterbelakangan Pendidikan, perubahan politik, harta material atau rendahnya peradaban budaya yang menjadi salah satu pemicu timbulnya paham radikalisme, padahal jika merujuk pada kata dasar radikal itu sendiri yang mana pengertiannya ialah sebuah akar atau disini dapat dipahami sebagai sebuah pemikiran yang berakar atau berdasar seharusnya radikalisme itu suatu hal yang positif dikarenakan sebuah pemikiran yang baik adalah pemikiran yang memiliki dasar atau sebuah argumentasi yang kuat. Radikalisme sendiri menurut Imran Tahir & M. Irwan Tahir dalam sebuah jurnalnya berjudul '*Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia*' berpendapat bahwa radikalisme bisa diartikan positif atau negatif atau berbentuk konstruktif dan destruktif, diartikan positif atau konstruktif jika dipagari oleh sikap toleransi atau sikap menahan diri dalam masyarakat, diartikan negatif atau destruktif jika pemahaman atau tindakan yang memiliki tujuan kuat untuk terwujudnya suatu perubahan secara cepat dan total. Dalam sebuah buku berjudul *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan*, Soe Hok Gie berpendapat bahwa, "Barangsiapa mengibarkan bendera Revolusioner, akan memperoleh pasaran di kalangan kaum radikal, kaum yang menunggu dengan tidak sabar perubahan-perubahan yang mereka harapkan. Kaum Radikal ini berasal dari segala golongan."

Sedangkan untuk terorisme sendiri, Presiden RI Bapak Joko Widodo pernah mengatakan dalam sebuah konferensi pers virtual dari istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/01/2020) bahwa '*Terorisme adalah terorisme, teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun.*' Jika ditinjau dari segi etimologi, terorisme berakar dari kata terror berarti takut, kecemasan atau bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang membuat rasa takut atau kepanikan terhadap masyarakat. Dari beberapa sumber salah satunya dari Wikipedia mencatat bahwa terjadi kurang lebih 7 aksi terror di Indonesia sepanjang tahun 2019 hingga 2021 saat ini, pernyataan yang dikeluarkan dari Presiden RI Bapak Joko Widodo semestinya mampu menjadi sebuah peredam kekhawatiran atau peredam amarah masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu karena sebagian besar pada kasus terorisme di Indonesia

kebanyakan mengarahkan pandangannya kepada Umat Islam yang seolah-olah mendukung tindak pidana terorisme atas nama jihad fisabilillah.

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil menyampaikan pembicaraan mengenai strategi untuk menghabisi jaringan terorisme dengan memberantas jaringan terorisme dari benihnya atau pintu masuknya ajaran ekstremisme, yaitu ajaran Wahabi dan pernyataan tersebut seketika di respon oleh Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq Mughni yang membantah dengan mengatakan bahwa "Salafi itu bukan mazhab yang monolitik. Ada banyak varian di dalamnya. Kalau ada teroris yang berpaham salafi, tidak berarti salafiyah identic dengan terorisme. Jika ada teroris yang beragama Islam, tidak berarti Islam mendorong terorisme." Rabu (31/3). Radikalisme dan terorisme ini yang seolah-olah tidak terpisahkan ini juga menjadi persoalan yang cukup pelik dalam internal politik dalam negeri dikarenakan sampai saat ini tidak ada yang mampu mendefinisikan secara konsisten terkait apaitu radikalisme dan terorisme.

KESIMPULAN

Politik Identitas sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan kepentingan bersama seharusnya diterapkan pada level-level perpolitikan skala besar seperti dinamika politik internasional karena politik identitas cenderung muncul ketika memiliki ikatan primordial yang sama, ideologi, pemahaman, atau suatu rasa kebanggaan yang sama seperti nasionalisme dan patriotisme. Politik identitas tidak cocok jika diterapkan pada level perpolitikan berskala kecil seperti kedaerahan atau bahkan dalam kancah politik dalam negeri juga politik identitas dirasa kurang cocok karena Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras dan agama yang berbeda-beda hanya akan menimbulkan perpecahan satu sama lainnya.

Selain itu, politik identitas juga dianggap sebagai munculnya pemikiran-pemikiran radikal yang mengarah kepada tindakan terorisme, meski begitu definisi radikal dan terorisme itu sendiri sebenarnya tidak benar-benar selesai pada tataran elit politik maupun elit tokoh masyarakat, terbukti dari berbagai macam pernyataan yang saling membantah seperti Ketua Umum PBNU dan Ketua PP

Muhammadiyah yang berarti memang jika pemerintahan benar-benar ingin fokus dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme dalam hal ini yang berwenang ialah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maka perlu ada nya langkah awal yang jauh lebih masif terkait pengertian apa itu radikalisme dan terorisme dan seperti apa ciri-cirinya. Akan tetapi, hal tersebut juga perlu memperhatikan kata dasar atau asal-usul dari kata radikalisme itu sendiri yang berarti akar atau bisa diartikan sesuatu yang mengakar, pemikiran yang mengakar atau memiliki dasar.

Sedangkan terorisme juga sampai saat ini Pemerintah masih terkesan tebang pilih dalam penindakan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan suatu terror atau kepanikan ditengah masyarakat. Beberapa media pemberitaan seringkali memberikan statement terorisme ketika adanya suatu tindakan terror dan entah mengapa hal tersebut seolah-olah memiliki pola bahwa mereka yang melakukan tindakan terror lalu memiliki gaya berpakaian Islami atau ber-agama Islam mudah sekali dikatakan terorisme, bahkan dalam beberapa kasus penyidikan atau penyitaan barang bukti tindak pidana terorisme ini berupa sebuah kitab Al – Qur'an atau kitab agama lainnya yang sebetulnya tidak bisa juga menjadi alat bukti yang kuat. Apa yang Pemerintah sikapi terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) tentu sangat jauh berbeda ketika menghadapi sekelompok lainnya yang lagi-lagi kebetulan ber-agama Islam, sejak lama Organisasi Papua Merdeka hanya menyandang status sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang padahal mereka sudah jelas-jelas melakukan aksi terror yang membuat khawatir masyarakat sekitar atau bahkan mengancam terlepasnya Papua dari Negara Indonesia.

Apa yang dikatakan oleh Soe Hok Gie dalam bukunya *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan* adalah suatu hal yang perlu dipahami bahwa siapapun yang mengibarkan bendera revolusi dengan maksud mewujudkan suatu perubahan yang besar dan total akan memperoleh pasar diantara kaum radikal yang berasal dari berbagai golongan. Jika politik identitas adalah suatu upaya kelompok tertentu untuk mencapai tujuan atau mempertahankan tujuan dan radikalisme serta terorisme adalah sebagian hasil dari politik identitas, maka ada

kemungkinan bahwa memang isu radikalisme dan terorisme ini digunakan kelompok-kelompok tertentu yang sedang berkuasa untuk menekan kekuatan lawan yang lebih besar dan memecah belahnya sama seperti politik belah bambu yang dilakukan oleh para pemimpin terdahulu terhadap umat Muslim khususnya Partai Masyumi.

Diskriminasi Rasial juga menjadi salah satu persoalan penting juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita semua, karena bagi penulis ada semacam korelasi antara tindakan terror-meneror dengan diskriminasi rasial. Seperti apa yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah salah satu contoh dimana tindakan terror bisa disebabkan karena adanya tindakan Diskriminasi Rasial. Berbeda dengan pendapat Alto Labetubun bahwa Politik Identitas harus dihentikan, dan Komnas HAM yang berpendapat bahwa Politik Identitas adalah akar masalah dari masalah rasial karena kerap kali menafikan adanya multikulturalisme. Seharusnya pemerintah memberikan pemahaman yang baik dan benar terkait bagaimana politik identitas yang baik, akan lebih baik lagi jika elit-elit politik di Indonesia dapat mencontohkannya, dan tentu tidak bisa berhenti sampai situ saja. Perlu adanya kedekatan emosional kepada mereka yang menjalankan politik identitas agar tetap mengakui adanya multikulturalisme, negara Indonesia dibangun oleh berbagai macam suku, budaya, bahasa, agama yang berbeda-beda dan hal itu tidak mungkin untuk menghapuskan sistem politik identitas di Negeri seperti Indonesia.

Kembali pada kutipan di awal tulisan ini, bahwa siapa saja yang mengibarkan bendera revolusioner akan mendapatkan pasaran di kaum radikal, dan kaum radikal ini yang tidak sabar akan menunggu perubahan-perubahan besar dan mereka (kaum radikal) ini berasal dari segala golongan. Maka kata radikal tersebut perlu dihentikan penggunaannya jika hanya menyasar kepada beberapa kelompok, untuk menghindari adanya kesan diskriminasi rasial atau diskriminasi kepada agama tertentu dan menghindari aksi terorisme-terorisme di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Dr. Lusi Andriyani, M.Si. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah – Politik Identitas dan Multikulturalisme yang selalu sabar dan mengerti kondisi mahasiswanya sendiri, berperan sebagai seorang pendidik sekaligus menjadi orang tua yang memberikan perhatian-perhatian sekecil apapun itu dengan maksud agar mahasiswa-mahasiswanya menjadi orang hebat dan sukses dalam bidangnya masing-masing. Mohon Maaf juga yang sebesar-besarnya jika sekiranya artikel ini sangat jauh dari standar, kesalahan murni ada pada diri saya selaku mahasiswa yang masih perlu banyak sekali belajar tentang berbagai hal terlebih dalam penyusunan artikel ilmiah dengan menghindari kesalahan-kesalahan akademik yang fatal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryojati, Ardipandanto. 2020. *Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme*. Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI
- Debora Sanur L. 2018. *Terorisme: Pola Aksi dan Antisipasinya*. Vol. X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, INFO Singkat
- Dina Lestari. 2019. *Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia*. SIMULACRA, Volume 2, No. 1
- Hesti Armiwulan. 2015. *Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. MMH, Jilid 44 No. 4
- Ilham Kurniawan. 2020. *Memaknai Radikalisme di Indonesia*. TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam. Vol. 3 No. 1
- Imran Tahir & M. Irwan Tahir. 2020. *Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah. Volume XII, Edisi 2 Desember 2020
- Kristianus. 2016. *Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (1)(2016) 87-101
- Moh. Rafli Abbas,. S.Ip,. M.A. 2016. *Ruang Publik dan Ekspresi Politik Identitas*;

- (Studi Tentang Pergulatan Identitas Ke-Papua-an di Yogyakarta)*. Jurnal Society, Vol. VI, No. 1
- Soe Hok Gie. 1999. *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Wening Purbatin Palupi S. 2019. *Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milenial Indonesia di Era 4.0*. Journal of Islamic Studies and Humanities. Vol. 4, No. 2